

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat secara inklusif dilakukan pada tahap pra bencana yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Sebagaimana tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang diantaranya melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana yang meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan, dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat. Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang timbul, terutama dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
2. Kendala yang dihadapi berupa keterbatasan dan pemberlakuan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana terhadap penyandang disabilitas yang telah masih lemah dan belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah maupun masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan aspirasi penyandang disabilitas sehingga belum mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana mestinya. Oleh karena itu melalui pendidikan dan

pelatihan diharapkan adanya kesadaran dan pola pikir pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Beberapa kegiatan dan latihan yang telah dilakukan di Kota Padang perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara berkala. Sehingga pengurangan risiko bencana menjadi prioritas dan pengarusutamaan untuk dapat diterapkan sampai ke tingkat kelurahan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BPBD Kota Padang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada organisasi-organisasi penyandang disabilitas kota padang dalam Pengurangan Risiko Bencana inklusif secara berkala dan menyeluruh minimal 4 kali dalam setahun dan memberikan suatu mata anggaran tersendiri untuk pelaksanaannya. Dengan pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana inklusif yang lebih efektif dan efisien maka akan memberikan jawaban yang lebih tepat mengenai target sasaran, serta kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok paling berisiko dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran di daerah.
2. Diharapkan pengurangan risiko bencana inklusif menjadi perhatian dan prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kota Padang cerdas bencana yang mana sesuai dengan misi kota Padang “menciptakan masyarakat sadar, peduli, dan tangguh bencana”. Hal ini dapat terwujud sejalan dengan tersedianya aksesibilitas baik fisik maupun non fisik untuk hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Selain itu, pembentukan organisasi-organisasi maupun unit-unit

pelayanan Disabilitas seperti, Forum Pengurangan Risiko disabilitas, Unit Layanan Disabilitas pada tingkat pendidikan maupun pada tingkat pemerintahan, serta pada institusi-institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik . Dengan adanya Unit Layanan Disabilitas akan dapat mewujudkan layanan pemenuhan hak dan peran aktif penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

